



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Nilai Aset 182 Desa Tembus Rp 666 Miliar

SELUMA - Berdasarkan antensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait dengan Kabupaten Seluma yang masih 41 persen nilai Indeks Monitoring Center For Prevention (MCP). Sehingga delapan sektor harus dilaporkan termasuk aset desa. Hal ini, hasil pendataan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma.

Dari 182 desa di Kabupaten Seluma nilai aset mencapai Rp 666 miliar lebih terdiri dari enam bidang mulai dari peralatan dan mesin, tanah, bangunan, irigasi dan jaringan, konstruksi dan aset tetap lainnya.

"Sampai saat ini sesuai dengan permintaan kami PMD semua desa telah menyampaikan nilai aset desa dalam bentuk inventaris aset desa," kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma Nopetri Elmanto, M.Si melalui Kabid Pembangunan Desa Darmawan.

Berdasarkan data yang dilaporkan ada tiga desa dengan jumlah aset tertinggi yakni pertama Desa Argo Binangun, Kecamatan Ulu Talo dengan total nilai aset sebesar Rp 19,7 miliar. Berikutnya Desa

Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas (SA) nilai aset Rp 11,6 miliar dan Desa Maras Batan, Kecamatan SAM dengan nilai aset Rp 8,6 miliar.

"Nanti data akan diverifikasi oleh inspektorat untuk memastikan kevaliditas data karena kami sebatas merekap dan pendataan," ujarnya.

Ia mengatakan, pendataan aset merupakan bagian dari melaporkan salah atau dari delapan area pencegahan dan pengendalian korupsi atau MCP oleh KPK RI. "Ini merupakan salah satu area atau indikator penilaian dalam angka penilaian MCP KPK dan salah satunya dalam databes. Setelah diverifikasi inspektorat baru diinput ke MCP KPK," sampainya.

Dalam laporan sistem KPK ini ada delapan bidang yang menjadi objek penilaian, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, pelaksanaan pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. **(juu)**